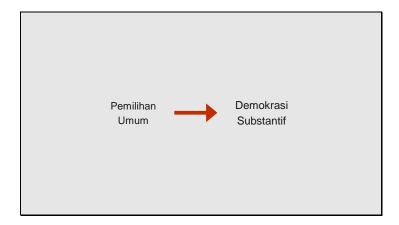


Selamat pagi, (bla-bla-bla)



Dalam menyelenggarakan pemilihan parlemen, masyarakat di sini menentukan pemimpin yang dapat membangun arah yang lebih baik di berbagai bidang, termasuk pembangunan, pendidikan, agama, sosial budaya, dan praktik umum.



Pemilihan umum sangat sejalan dengan semangat demokrasi substantif, yaitu demokrasi dalam arti pemerintahan yang diselenggarakan oleh, dan untuk rakyat. Ini berarti bahwa mereka yang menjalankan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan tidak dapat menjalankannya sebagai sarana nasional untuk pemerintahan atau regulasi tanpa rakyat.



Salah satu strategi yang sering dilakukan oleh para calon yang ingin memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan yaitu dengan membayar suara rakyat atau sering disebut dengan politik uang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau berpartisipasi terhadap pemilihan pemerintahan yang akan berlangsung.



Kita dapat memecah masalah politik uang ini menjadi ke tiga masalah berbeda. Yaitu

- 1. Politik Uang itu seperti apa sih?
- 2. Lalu bagaimana pengaruhnya di Pilkada Indonesia?
- 3. Dan terakhir, apakah ada solusinya?

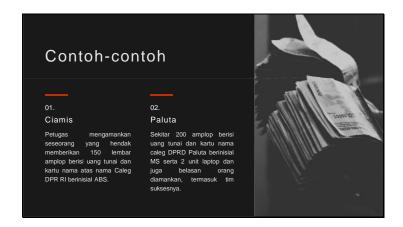


Robin Hodess (2004) mendefinisikan korupsi politik atau politik uang sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi *(political leaders or elected officials)* untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan.



Dan dapat kami simpulkan bahwa Politik Uang memiliki dua definisi:

- Politik uang adalah pertukaran uang dengan maksud tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat yang sebenarnya digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun partai politik.
- Politik uang juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu agar orang tersebut tidak menjalankan haknya dengan benar. Di Indonesia sendiri politik uang identik dengan tindakan suap atau biasa disebut sebagai serangan fajar.



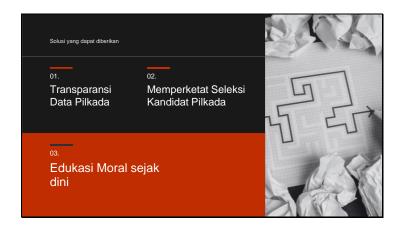
Beberapa contohnya yaitu pada 14 April 2019 di daerah Ciamis, Jawa Barat, petugas mengamankan seseorang yang hendak memberikan 150 lembar amplop berisi uang tunai dan kartu nama atas nama Caleg DPR RI berinisial ABS.

Kemudian besoknya, yaitu 15 April 2019 Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, sekitar 200 amplop berisi uang tunai dan kartu nama caleg DPRD Paluta berinisial MS serta 2 unit laptop dan juga belasan orang diamankan, termasuk tim suksesnya.



Praktek Politik uang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia dan menyebabkan demokrasi yang sakit atau tidak stabil. Demokrasi yang seharusnya bebas menjadi tidak bebas hanya dengan membeli hak suara tersebut. Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang kini hanya menjadi milik uang.

Selain itu, praktek Politik Uang disini juga dapat merusak moral demokrasi karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinan nya, bukan karena kinerjanya, bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingan oknum-oknum tersebut.



Transparansi Data

Yang dimaksud dengan transparansi adalah semua data-data yang ada di dalam proses Pilkada Indonesia dapat diakses dan dilihat secara bebas oleh masyarakat Indonesia.

Data-data ini bisa berupa pergerakan uang kampanye, latar belakang serta riwayat keuangan masing-masing calon. Hal ini dilakukan untuk memberikan masyarakat pandangan dan keyakinan dalam memilih seorang calon.

• Memperketat seleksi kandidat pilkada

Diantaranya adalah dengan cara menambahkan bobot yang lebih tinggi dalam faktor kompetensi, integritas, dan juga pengalaman dalam seleksi calon kepala daerah. Seleksi rekam jejak juga penting dan harus lebih diperhatikan terutama dalam aspek integritas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. (Untuk aspek integritas, partai dapat melihat dari pernah atau tidaknya terlibat tindak pidana kriminal atau korupsi).

• Edukasi moral sejak dini

Edukasi atau Pendidikan moral sejak dini ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada usia dini, dimulai dari mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan menanamkan sikap disiplin. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka dari tindakan korupsi serta hal buruk dan jahat yang akan merusak moral pada generasi selanjutnya



Berikut adalah video yang menurut kami membantu dalam memahami topik politik uang ini.



Kami sekarang akan membuka sesi tanya jawab selama 5 menit, bagi yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya secara lisan atau melalui chat zoom.



Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak David Tobing selaku Dosen Pancasila untuk menyampaikan catatan kritisnya



menyimpulkan Politik uang dapat bahwa adalah tindakan pemberian menyimpang dari kampanye pemilu berupa untuk mengikuti kehendak rakyat. Dari sudah dibahas, yang dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi pemilihan umum yang tampaknya marak di masyarakat kita, diwarnai dengan kecurangan. kebijakan uang untuk membeli suara rakyat. Rakyat tidak bisa mandiri pemilu. memilih dalam Dan hal bertentangan dengan norma etika dan agama yang tersebar luas.

Politik uang juga dapat menghancurkan struktur politik yang jujur dan sehat yang menjadi pilar dalam memilih pemimpin yang memiliki keterampilan dan kemampuan. Ada banyak alasan kenapa money politik diantaranya, masyarakat masih belum siap untuk hidup demokrasi dan juga kurangnya ketegasan hukum di Indonesia.



Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti kegiatan webinar kelompok kami, mudah-mudahan materi yang telah diberikan dapat memberikan pemahaman baru mengenai politik uang yang saat ini menjadi polemic di dalam Pilkada Indonesia.